



DKPP
FESTIVAL
ETIK 2026

Panduan Lomba

**Video Kreatif dan
Karya Tulis Jurnalistik**

Informasi:
Wildan (08121692509)
Fathi (082114323735)

 dkpp_ri  @dkpp_ri
 festivaletik@dkpp.go.id

PENDAHULUAN

Festival Etik adalah sebuah program DKPP dalam mensosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan cara-cara populis. Program ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mencerna tentang kebutuhan mutlak Pemilu terhadap penyelenggara pemilu yang berintegritas dan beradab sehingga pemahaman masyarakat tentang pentingnya KEPP dalam pelaksanaan Pemilu pun diharapkan meningkat secara signifikan.

Dalam program Festival Etik 2026, terdapat tiga kegiatan, yaitu lomba video kreatif, lomba karya tulis jurnalistik, dan pameran foto.

Program ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lebih mendekatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta kerja-kerja yang dilaksanakan oleh lembaga

ini dalam menegakkan KEPP dan marwah demokrasi di Indonesia.

Tujuan dari kegiatan Festival Etik adalah

1. Mendekatkan DKPP sebagai lembaga penegak KEPP kepada kalangan generasi muda.
2. Meningkatkan literasi generasi muda mengenai etika dan KEPP.
3. Mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam menyebarluaskan nilai-nilai etika pemilu melalui karya kreatif.
4. Menciptakan agen-agen literasi KEPP

Dalam pelaksanaan untuk tahun 2026, DKPP memilih **“Etika dan Keadilan Pemilu”** sebagai tema dari Festival Etik. Tema ini sengaja dipilih untuk menunjukkan relevansi etika dalam mewujudkan Pemilu yang adil.

SUBTEMA LOMBA

Meskipun telah memilih “Etika dan Keadilan Pemilu” sebagai tema kegiatan dalam Festival Etik 2026, kami mencoba membuat beberapa subtema untuk lomba video pendek dan lomba karya tulis jurnalistik. Subtema ini dirasa dapat memudahkan masyarakat atau calon peserta lomba dalam menerjemahkan tema besar. Berikut adalah subtema-subtema untuk lomba yang terdapat dalam Festival Etik 2026:

1. Pemilu Jujur dan Adil Untuk Masa Depan Indonesia

Per April 2026, tercatat ada 11 kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ironisnya, 11 kepala daerah tersebut adalah produk dari Pilkada 2024 yang baru saja dilantik pada 20 Februari 2025. Hal ini menjadi preseden bahwa terdapat produk Pilkada yang telah berdampak pada kehidupan masyarakat.

Subtema ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Pemilu yang jujur dan adil merupakan fondasi utama demokrasi karena memastikan setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama dan dihormati. Melalui subtema ini, peserta dapat mengangkat gagasan mengenai pentingnya integritas dalam pemilu, partisipasi masyarakat, serta dampak positif pemilu yang berkualitas bagi masa depan bangsa dan negara. Dengan demikian, proses dan hasil Pemilu memiliki dampak terhadap masa depan Indonesia.

2. Penyelenggara Pemilu Beretika dan Berintegritas, Awal dari Demokrasi yang Beradab

Begawan hukum tata negara, Prof. Jimly Asshidiqie seringkali menyebut, “hukum adalah kapal yang berlayar di samudera etik yang tujuannya berlabuh di pulau keadilan”. Dari pernyataan tersebut, dapat

ditarik bahwa persoalan etika lebih luas dan mendalam daripada hukum.

Pun demikian jika kita membahas konteks kepemiluan. Jika merujuk pada Pernyataan Jimly Asshidiqie, problematika hukum dalam Pemilu/ Pilkada sejatinya tidak akan terjadi jika semua pihak mengedepankan etika dan integritas.

Subtema ini menyoroti pentingnya peran penyelenggara pemilu yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, netralitas, dan integritas dalam setiap tahapan pemilu. Penyelenggara pemilu yang beretika akan menciptakan kepercayaan publik serta menjamin proses demokrasi berjalan secara tertib dan bermartabat. Peserta dapat mengangkat ide mengenai pentingnya kode etik, tanggung jawab moral, serta peran penyelenggara dalam membangun demokrasi yang sehat dan beradab.

3. Pemilu Tanpa Kecurangan, Sebuah Kompetisi yang Adil dan Beretika

Bawaslu mencatat, terdapat 130 laporan politik uang selama masa tenang dan hari pemungutan suara.

Berdasar data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terdapat 31 perkara politik uang yang diperiksa lembaga tersebut pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Selain itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia juga menyebutkan terdapat 35% pemilih yang menentukan pilihannya pada Pemilu 2024 karena uang. Angka ini meningkat 7% jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Data di atas tentu menunjukkan bahwa kecurangan Pemilu/ Pilkada ternyata sudah sangat kompleks karena telah melibatkan penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan juga pemilih (masyarakat).

Subtema ini menegaskan bahwa pemilu merupakan ajang kompetisi politik yang harus dilaksanakan secara sehat, adil, dan sesuai aturan. Segala bentuk

kecurangan seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi suara, kampanye hitam, maupun penyebaran hoaks dapat merusak kualitas demokrasi. Melalui subtema ini, peserta dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya sportivitas dalam kontestasi politik, persaingan gagasan yang sehat, serta komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat.

4. DKPP, Benteng Etika Penyelenggara Pemilu

Pada periode 2012-2025, DKPP telah memeriksa 2.664 perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang melibatkan lebih dari 10.000 penyelenggara Pemilu. Dari semua teradu yang diperiksa selama 13 tahun keberadaannya, 42,82 persen teradu telah dijatuhi sanksi oleh DKPP. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis (3.267 teradu), pemberhentian sementara (85 teradu), pemberhentian dari jabatan (106 teradu), dan **pemberhentian tetap** (806 teradu).

Jika dirata-rata, setiap tahun DKPP menangani 203 perkara dugaan pelanggaran KEPP. Selain itu, DKPP telah memberhentikan tetap kepada rata-rata 62 penyelenggara pemilu yang melakukan kategori pelanggaran KEPP berat setiap tahunnya.

Subtema ini menyoroti peran DKPP sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. DKPP memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggara pemilu bekerja secara profesional, mandiri, jujur, dan adil. Peserta dapat mengangkat gagasan mengenai pentingnya penegakan etika, kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu, serta kontribusi DKPP dalam memperkuat demokrasi Indonesia.

SYARAT LOMBA

Syarat lomba video kreatif:

1. Terbuka untuk umum.
2. Jumlah peserta maksimal 5 orang dalam setiap tim.
3. Peserta dapat memilih salah satu subtema yang telah ditentukan.
4. Peserta hanya dapat mengirimkan satu karya saja.
5. Video berdurasi: 3-5 menit.
6. Video yang diikutkan lomba adalah karya orisinal dan belum pernah diperlombakan.
7. Dipublikasikan di akun tiktok dan IG masing-masing peserta dengan mention ke akun @dkpp_ri dengan hashtag #dkppri dan #festivaletik2026.
8. Video harus dipublikasikan paling lambat 31 Mei 2026
9. Peserta mengirimkan link publikasi, ide cerita, dan file video ke tautan bit.ly/PendaftaranFestivalEtik2026.

10. Video yang diikutkan lomba tidak mengandung pelecehan/penghinaan terhadap unsur SARA dan juga tidak menghina/melecehkan individu maupun instansi/lembaga.
11. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.
12. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berhak mempublikasikan karya pemenang dengan mencantumkan sumber.
13. Dengan registrasi dan mengirimkan karya kepada panitia, peserta menyetujui semua syarat dan ketentuan lomba ini, baik yang telah ditentukan sekarang maupun di kemudian hari oleh penyelenggara.

Syarat lomba karya tulis jurnalistik:

1. Peserta adalah jurnalis.
2. Peserta adalah perorangan, bukan kelompok.
3. Peserta dapat memilih salah satu subtema yang telah ditentukan.
4. Peserta hanya dapat mengirimkan satu karya saja.

5. Karya tulis yang diikutkan lomba berjenis *indepth news*.
6. Karya tulis adalah karya orisinal dan belum pernah dipertandingkan.
7. Panjang tulisan: 4.000 - 12.000 karakter
8. Karya tulis yang diikutkan lomba harus dipublikasikan di media online paling lambat 31 Mei 2026.
9. Karya tulis yang diikutkan lomba tidak mengandung pelecehan/penghinaan terhadap unsur SARA dan juga tidak menghina/melecehkan individu maupun instansi/lembaga
10. Mengirimkan link publikasi, naskah berupa PDF, dan id pers ke tautan bit.ly/PendaftaranFestivalEtik2026.
11. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.
12. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berhak mempublikasikan karya pemenang dengan mencantumkan sumber.
13. Dengan registrasi dan mengirimkan karya kepada panitia, peserta menyetujui semua syarat dan

ketentuan lomba ini, baik yang telah ditentukan sekarang maupun di kemudian hari oleh penyelenggara.